

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Semua negara menginginkan adanya peningkatan standar hidup bagi setiap rakyatnya dari segala lapisan, dengan cara mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki, kemudian menyusun rencana-rencana pembangunan dan melaksanakannya melalui partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sehingga tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya (Nangarumba, 2015).

Ketimpangan merupakan masalah yang sangat sulit untuk dimusnahkan, melainkan hanya dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan pasti selalu ada, baik di negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju. Seperti ketimpangan hasil pembangunan misalnya dalam hal pendapatan perkapita atau pendapatan daerah, dan ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri.

Masalah ketimpangan ini, dalam praktik sering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi berbagai daerah di Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia seharusnya mampu memberikan

kesejahteraan masyarakat jika regulasi berpihak kepada rakyatnya. Namun, yang terjadi sebaliknya kesenjangan terjadi di mana-mana. Misalnya, di daerah yang miskin dan APBD-nya rendah, para pejabat dan kepala dinas mengendarai mobil-mobil mewah dan tinggal diperumahan mewah. Tak ketinggalan para kontraktor sebagai mitra kerja pemda juga ikut menampilkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi alam secara besar-besaran di daerah, masyarakat di sekitarnya hanya bisa menjadi penonton, mendorong munculnya kecemburuan sosial, terus memicu kesenjangan, dan berujung pada tindak kekerasan lainnya (Kuncoro, 2014).

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Teori jalur cepat yang diperkenalkan Samuelson menyatakan bagaimana daerah mengangkat sektor yang potensial dilihat dari potensi alam dan keuntungan kompetitif (Amrillah & Yasa, 2013).

Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari Indonesia yang terdiri dari 29 kabupaten yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang,

Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari masalah ketimpangan ekonomi. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik antar kabupaten yang mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi di suatu wilayah, sehingga suatu kewajaran bila pola pembangunan ekonomi antar wilayah belum merata. Ketidakmerataan ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada akhirnya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah.

Jumlah Penduduk adalah semua orang yang berdomosili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

PDRB ADHK yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung memakai harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa hanya ada satu kabupaten yang memiliki rata-rata PDRB ADHK yang sangat jauh jaraknya dari kabupaten lainnya yaitu kabupaten Cilacap (Rp. 88.141.197) Tingginya PDRB di kabupaten

Cilacap dipengaruhi pendapatan dari sektor migas yang besar karena merupakan kabupaten penghasil minyak di Jawa Tengah. Perkembangan PDRB di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

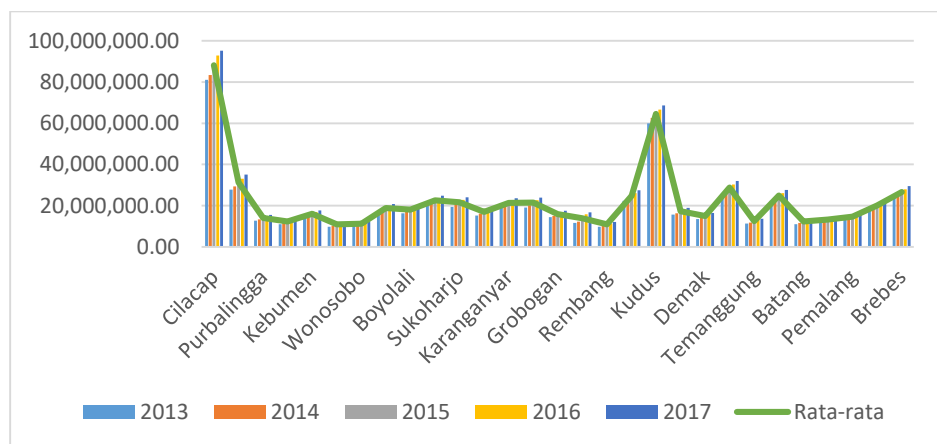
**Produk Domestik Regional Bruto ADHK Menurut Kabupaten
di Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)**

Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Cilacap	81.022.670,26	83.391.500,18	88.357.606,68	92.830.362,20	95.103.846,69	88.141.197,20
Banyumas	27.793.138,47	29.367.687,40	31.164.876,40	33.051.046,65	35.147.313,30	31.304.812,44
Purbalingga	12.778.311,23	13.397.712,78	14.130.612,26	14.806.549,63	15.564.284,43	14.135.494,07
Banjarnegara	11.043.083,01	11.629.845,85	12.266.046,35	12.929.657,38	13.630.385,44	12.299.803,61
Kebumen	14.333.333,50	15.163.091,84	16.115.554,01	16.916.219,56	17.743.915,15	16.054.422,81
Purworejo	9.870.969,95	10.312.937,79	10.862.645,98	11.418.355,22	12.005.095,39	10.894.000,87
Wonosobo	10.333.757,05	10.828.168,68	11.334.080,04	11.915.998,92	12.292.804,84	11.340.961,91
Magelang	17.020.755,61	17.936.288,38	18.864.651,97	19.876.744,24	20.882.801,03	18.916.248,24
Boyolali	16.266.498,68	17.148.350,76	18.170.383,95	19.132.556,30	20.188.699,71	18.181.297,88
Klaten	20.241.429,01	21.424.522,36	22.558.976,15	23.717.931,02	24.920.302,86	22.572.632,28
Sukoharjo	19.401.889,44	20.449.009,84	21.612.078,19	22.845.982,81	24.152.939,48	21.692.379,95
Wonogiri	15.303.280,47	16.107.795,17	16.977.198,56	17.865.345,42	18.788.397,76	17.008.403,48
Karanganyar	19.256.516,28	20.262.444,42	21.286.287,14	22.428.793,80	23.665.952,05	21.379.998,74
Sragen	19.102.181,74	20.169.824,79	21.390.871,20	22.618.321,66	23.933.252,17	21.442.890,31
Grobogan	14.474.728,93	15.064.456,66	15.962.619,43	16.674.629,70	17.617.254,27	15.958.737,80
Blora	11.712.504,85	12.227.201,29	12.882.587,70	15.913.432,03	16.843.360,54	13.915.817,28
Rembang	9.780.750,39	10.284.274,36	10.850.269,20	11.418.008,73	12.123.468,84	10.891.354,30
Pati	22.329.693,98	23.365.213,99	24.770.325,07	26.121.955,34	27.532.168,10	24.823.871,30
Kudus	59.944.556,52	62.600.680,87	65.029.937,50	66.669.085,40	68.649.053,55	64.578.662,77
Jepara	15.623.738,87	16.374.715,21	17.210.365,92	18.074.134,88	19.001.040,83	17.256.799,14
Demak	13.499.226,47	14.078.419,80	14.912.999,60	15.666.347,56	16.537.579,21	14.938.914,53
Semarang	25.758.121,08	27.264.112,96	28.768.327,30	30.283.032,61	31.939.250,10	28.802.568,81
Temanggung	11.299.342,97	11.867.679,59	12.489.394,54	13.110.745,64	13.724.464,81	12.498.325,51
Kendal	22.386.123,50	23.536.834,39	24.762.325,36	26.131.137,07	27.586.097,11	24.880.503,49
Batang	11.104.696,78	11.693.897,06	12.328.239,23	12.942.691,09	13.627.279,81	12.339.360,79
Pekalongan	12.034.805,89	12.630.368,82	13.234.564,04	13.917.701,83	14.652.178,71	13.293.923,86
Pemalang	13.172.063,61	13.898.669,42	14.673.696,23	15.463.800,55	16.297.654,01	14.701.176,77
Tegal	18.050.291,97	18.958.841,04	19.999.475,45	21.182.917,23	22.322.100,13	20.102.725,16
Brebes	23.812.056,92	25.074.171,51	26.572.834,89	27.921.986,33	29.450.228,81	26.566.255,69

Sumber: BPS, diolah

Gambar 1.1 Menunjukkan tingkat perolehan PDRB ADHK dari dua puluh sembilan kabupaten di provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Perkembangan PDRB di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
PDRB Jawa Tengah



Pendapatan asli daerah (PAD) memiliki peran penting sebagai tolak ukur dari pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Menurut (Arsyad, 2010) empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat atau negara terdiri dari 1) akumulasi modal, 2) pertumbuhan penduduk, 3) kemajuan teknologi, 4) sumber daya institusi (sistem kelembagaan).

Kebijakan upah minimum diterapkan pertama secara hukum di Indonesia pada tahun 1989. Sistem baru ini mengharuskan upah minimum ditetapkan dengan mengacu pada kebutuhan fisik minum biaya hidup dan kondisi pasar

tenaga kerja. Dengan kondisi tersebut pemerintah ingin membawa upah minimum sesuai dengan kriteria biaya konsumsi atau KFM (Kebutuhan Fisik Minimum) pada tahun 1994. Kriteria terakhir bernama KHL (Kebutuhan Hidup Layak) ditetapkan oleh peraturan menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-17/Men/2005 dengan komponen hidup yang lebih luas mengandung 46 komponen kebutuhan pekerja yang belum menikah hidup dan telah direvisi oleh Departemen Tenaga Kerja dan Peraturan Nomor 13/2012 ke Transmigrasi 60 komponen kebutuhan hidup. Dan kriteria terakhir ini menjadi dasar dari proses kebijakan upah minimum sejak 2013 hingga saat ini (Sungkar, Dkk. 2015).

Atas hal tersebut maka penting ditelaah lebih lanjut mengenai Apakah PDRB, Jumlah Penduduk, Pendapatan asli daerah (PAD), Inflasi, UMK berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.

B. Rumusan Masalah

Ketimpangan Pendapatan penduduk Jawa Tengah yang mengalami ketidakmerataan dari tahun ke tahun akibat dari ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah dilihat dari hasil rata-rata PDRB perkapita antar kabupaten belum merata sehingga beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perumusan masalah atau pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap ketimpangan antar kabupaten di Jawa Tengah?
2. Apakah Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Jawa Tengah?
2. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Jawa Tengah?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Jawa Tengah?
4. Apakah upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Jawa Tengah tahun 2013-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk (JP) terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Jawa Tengah tahun 2013-2017.
3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Jawa Tengah tahun 2013-2017.
4. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Jawa Tengah tahun 2013-2017.
5. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum Kabupaten (UMK) terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2013-2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah atau Instansi Tertentu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah dalam rangka menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan serta pemeratan pembangunan khususnya untuk kabupaten di Kawasan Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Pembaca

Bagi pembaca diharapkan bisa menjadi informasi dan bahan acuan untuk melakukan penelitian sejenis ataupun lebih lanjut.

3. Bagi Peneliti

Bagi penulis sendiri penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran dalam penerapan ilmu yang telah dipelajari di bidang ekonomi selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad Surakarta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data panel yaitu gabungan dari *time series* yaitu periode 2013-2017 dan *cross section* adalah 29 Kabupaten di Jawa Tengah. Data yang digunakan meliputi data Indeks Gini yang merupakan ukuran ketimpangan pendapatan, PDRB, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Inflasi, dan Upah Minimum Kabupaten. Data dalam objek penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dinas

atau instansi terkait dan literatur serta data-data lain yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian ini.

2. Metode Analisis Data

a. Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Indeks Gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, semakin mendekati angka nol bermakna bahwa tingkat pemerataan dari suatu variabel cukup baik. Sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semua pendapatan, semakin mendekati angka satu menandakan bahwa telah terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan (Riani, 2016). Adapun rumus umum Indeks Gini:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \mu_{it}$$

Di mana:

i	: 1, 2, ..., N
t	: 1, 2, ..., T
Y	: Variabel terikat
α	: Koefisien intersep
β	: Menunjukkan arah dan pengaruh masing-masing
X	: Variabel bebas
N	: Banyaknya observasi
T	: Banyaknya waktu
μ	: Faktor gangguan atau tidak dapat diamati

b. Regresi *Panel Least Square* (PLS)

Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi *panel least square* (PLS). Spesifikasi model ketimpangan pendapatan yang digunakan dalam

penelitian ini diduga dipengaruhi oleh PDRB, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Inflasi dan Upah Minimum Kabupaten.

Model regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$IG = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Di mana:

IG = Indeks Gini Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2013-2017

X1 = PDRB Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2013-2017

X2 = JP Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2013-2017

X3 = PAD Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2013-2017

X4 = INF Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2013-2017

X5 = UMK Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2013-2017

α = Konstan

$\beta_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien regresi

μ = Standar eror

Sumber: Modifikasi dari Replikasi Penelitian oleh Putri, N. P., & Natha, I. K. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol. 4 No. 1.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Uraian skripsi ini secara menyeluruh akan menjelaskan tentang PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, Pendapatan Asli Daerah, UMK terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah. Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori

Menyajikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Merupakan uraian tentang variabel penelitian dari definisi operasional variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Analisis Data Dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum hasil penelitian, berdasarkan nilai Indeks Gini dan hasil analisis keterkaitan variabel berdasarkan model regresi data panel.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan serangkaian pembahasan skripsi pada bab IV serta saran-saran yang perlu disampaikan.

Daftar Pustaka

Lampiran